

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WANATERNAK NASIONAL YANG BERKELANJUTAN (Policy for Development of Sustainable Nasional Silvopasture)

Oleh/By :
Subarudi ¹⁾

¹⁾ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16610. Telepon 0251 8633944
Email: rudi.subarudi@yahoo.co.id

ABSTRACT

Silvopasture program initiated by Ministry of Forestry is further implemented by forest allocation of 200.000 ha. This program should be conducted in line with sustainable forest management and increased forest role in poverty reduction. In limited data and information related to silvopasture, a policy review on sustainable silvopasture development at national level is required. This policy review was conducted through desk study using a descriptive method. Result of the review shown that term of wanaternak is suitable for Indonesian term of silvopasture for its easy understanding. Development of silvopasture program is a right and strategic action to be implemented due to some reasons: (i) livestock sector has a potential contribution to reduce import value of agriculture products; (ii) silvopasture development would support 2 fields of 10 excelent industry clustering units; and (iv) silvopasture increase income of farmers (50-300%) compared to their income without livestock. Forest allocation for silvopasture should be done after completing its criteria and indicator to prevent the misuse of the allocated forest. Meanwile sustainable silvopasture management should be implemented through an excelent and integrated silvopasture, clear institutional system of silvopasture, health silvopasture processing and produt diversification, good and fair marketing system. Strategies to achieve sustainable silvopasture management have to be done by sinergizing and harmonizing among Ministry of Forestry, Ministry of Agriculture, and local governments that highly committed to develop livestock system as excelent development sector in its region.

Keywords: Policy, silvopasture, national and sustainability

ABSTRAK

Program wanaternak yang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan dilakukan dengan mengalokasikan kawasan hutannya seluas 200.000 ha perlu terus direalisasikan dalam koridor pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan peranan hutan dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat keterbatasan data dan informasi dalam pelaksanaan program wanaternak tersebut, maka kajian kebijakan pengembangan wanaternak nasional ini dibutuhkan terkait dengan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara desk study dan menggunakan metoda deskriptif untuk menguraikan dan menganalisis data dan informasi yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah wanaternak adalah padanan yang tepat untuk silvopasture untuk memudahkan pemahaman arti dan maknanya kepada para pemangku kepentingannya. Pelaksanaan program wanaternak oleh Dephut merupakan langkah yang tepat dan strategis dengan alasan: (i) kontribusi subsektor peternakan yang potensial dalam mengurangi nilai impor produk pertanian; (ii) pengembangan wanaternak akan mendukung pencapaian swasembada daging nasional tahun 2010; (iii) pengembangan wanaternak diharapkan mendukung 2 bidang dari 10 kluster industri unggulan; dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekitar (50-300%) dibandingkan dengan pendapatan petani tanpa ternak. Pengalokasikan kawasan hutan untuk pengembangan wanaternak seharusnya dilakukan setelah selesai penyusunan kriteria dan indikatornya untuk menghindari penyimpangan alokasi kawasan hutan untuk

penggunaan lainnya di luar pengembangan wanaternak. Sedangkan manajemen wanaternak yang berkelanjutan harus terus diupayakan dengan merancang sistem wanaternak yang unggul dan terpadu, kelembagaan pengelola wanaternak yang jelas dan rinci, proses pengolahan dan diversifikasi produk wanaternak yang sehat dan bernilai tinggi, dan proses pemasaran yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran tersebut sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Strategi mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya.

Kata kunci: Kebijakan, wanaternak, nasional dan berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kampanye pilpres di bidang kesejahteraan masyarakat perlu ditindak lanjuti oleh para Menteri Kabinet Bersatu II secara konsisten dan konsekuen, di antaranya: (i) kecukupan dan ketahanan pangan, (ii) kecukupan sandang dan papan, (iii) peningkatan penghasilan, (iv) penciptaan lapangan kerja, dan (v) menjaga lingkungan (AgroIndonesia, 2009). Janji tersebut diharapkan bukan hanya slogan penarik suara rakyat pada saat kampanye. Hal yang sama terjadi pada program hutan untuk pengentasan kemiskinan (*forest for poor*) yang masih tanpa makna karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan masih tetap miskin.

Program hutan untuk pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970an sejak diadakan seminar nasional tentang hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan hingga kini masih terus bergulir dengan berbagai program lainnya. Namun program tersebut dilaksanakan tanpa keberadaan suatu konsep yang utuh dan seringkali prinsip kesinambungannya cenderung diabaikan sehingga program pengentasan kemiskinan dipandang hanya sebatas proyek "*charity*" belaka (Subarudi, 2000).

Terakhir program hutan untuk pengentasan kemiskinan diangkat kepermukaan kembali oleh Departemen Kehutanan (Dephut) melalui program wanaternak (*silvopasture*), yaitu kombinasi antara kegiatan sektor kehutanan dan kegiatan peternakan. Dephut telah mengalokasikan kawasan hutan produksi seluas 200.000 hektar untuk dijadikan kawasan peternakan dengan target populasi ternak sekitar 600.000 ekor sapi. Kawasan hutan tersebut rencananya akan diberikan kepada pengusaha peternakan baik skala kecil maupun besar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Khusus kelompok tani akan diberikan sekitar 50 hektar untuk setiap unit usaha wanaternak (Kompas, 01/09/2009).

Wanaternak dipilih oleh Departemen Kehutanan karena wanaternak sejalan dengan skema pemanfaatan lahan hutan secara sinergis dengan kepentingan peternakan sehingga tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor daging dapat dikurangi. Program wanaternak ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Dephut, tetapi program yang sudah lama ditinggalkan, sekarang dihidupkan kembali dalam rangka mencapai swasembada daging tahun 2014 dan pengelolaan hutan lestari melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu (daun sebagai pakan ternak) (AgroIndonesia, 2009).

Program wanaternak ini sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan Departemen Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 yang sudah mengucurkan skema kredit usaha peternakan melalui pemberian bibit sapi unggul dan kemudian bibit sapi yang sudah dilahirkan akan digulirkan kembali untuk kelompok-kelompok tani lainnya. Namun hingga saat ini, Dephut belum memiliki acuan yang tepat dan lengkap terkait dengan pengembangan wanaternak, penentuan kriteria dan indikator hutan yang sesuai untuk program wanaternak tersebut dan rumusan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program wanaternak tersebut.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan arah bagi Dephut dalam pengembangan wanaternak yang berkelanjutan. Tujuan penulisan ini adalah: (i) memberikan pengertian dan terjemahan yang tepat untuk *silvopature*; (ii) memberikan sekilas gambaran sektor peternakan nasional; (iii) menyusun kriteria dan indikator kawasan hutan yang cocok untuk program wanaternak; (iv) manajemen wanaternak yang berkelanjutan; dan (v) strategi implementasi program wanaternak.

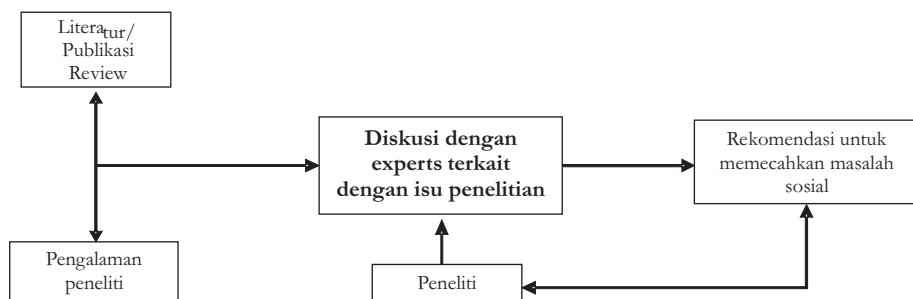
II. METODE PENELITIAN

Fokus dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pengembangan wanaternak nasional difokuskan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 3 bulan (5 Agustus - 5 Oktober 2009) dengan penekanan kepada konsep pengembangan wanaternak yang berkelanjutan dan kriteria dan indikator kawasan hutan yang cocok untuk kegiatan pengembangan wanaternak di seluruh nusantara.

Metode Penelitian

Penelitian kebijakan ini menggunakan metode sintesis terfokus (*a focused synthesis method*). Burton (1979) dalam Danim (2000) menyatakan bahwa metode sintesa terfokus dapat dilakukan sebagai berikut: (i) membahas literatur terbaru yang tersedia dan dikaitkan dengan masalah-masalah utama atau fokus penelitian; (ii) tukar menukar pengalaman penelitian di lapangan; dan (iii) mendiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme kerja dalam metoda sintesis terfokus
Figure 1. Working mechnism in a focused synthesis method

C. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar adalah data sekunder yang berasal dari berbagai instansi lingkup Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian (Dirjen Peternakan) serta literatur dan publikasi yang relevan terhadap topik penelitian yang dilakukan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli di bidang wanaternakan.

Data yang telah terkumpul ditabulasikan dan dianalisis sesuai dengan keperluannya. Kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang sudah diolah tersebut untuk menjawab tujuan penelitian ini.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Silvopasture*

Secara umum *silvopasture* diartikan sebagai kegiatan kombinasi antara kegiatan kehutanan dan peternakan dalam suatu kawasan hutan atau luasan lahan (Sugiarto, 2009). Untuk memudahkan masyarakat awam untuk memahami arti dan makna *silvopasture*, maka istilah atau padanan Bahasa Indonesianya yang tepat adalah wanaternakan. Hal ini sejalan dengan penggunaan istilah lainnya yang sudah lebih dulu dikenal, di antaranya wanatani (istilah untuk *agroforestry*).

Winarto (2006) menjelaskan pengertian wanatani dalam Kamus Rimbawan adalah sistem penanaman hutan dengan tanaman tumpang sari jenis tanaman pangan atau perkebunan yang ditanam sebagai tanaman pencampur dengan memanfaatkan ruang tumbuh yang belum terkena naungan selama 2-3 tahun dan hasil akhirnya berupa tanaman kayu-kayuan. Dengan demikian definisi wanaternakan dapat dirumuskan sebagai hasil modifikasi dari batasan wanatani, yaitu: sistem penanaman hutan dengan tanaman tumpang sari jenis tanaman pakan ternak yang ditanam sebagai tanaman pencampur dengan memanfaatkan ruang tumbuh yang belum terkena naungan dan hasil akhirnya tetap berupa tanaman kayu-kayuan.

Penggunaan istilah wanaternakan dirasakan sangat tepat untuk memudahkan pengertian dan pemahaman terkait dengan istilah *silvopasture* karena istilah di bidang lainnya yang menggunakan padanan kata wana sudah lazim digunakan seperti wanafarma (istilah untuk *forest medicine*), wanariset (istilah untuk *research forest*), dan wanawisata (istilah untuk *recreation forest*).

B. Gambaran Sektor Peternakan Nasional

Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa konsumsi daging sapi perkapita rata-rata meningkat dari 0,31 kg pada tahun 1990 menjadi 0,62 kg pada tahun 1996. Proyeksi impor ternak bakalan dan daging sapi masing-masing akan mencapai 446.225 ekor dan 23.520 ton. Data Ditjen Peternakan tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah ternak sapi di Indonesia mencapai 11,3 juta ekor atau meningkat 4,5% dibandingkan populasi tahun 2006 yang hanya sekitar 10,8 juta ekor. Tahun 2008 peningkatan populasi sama dengan tahun 2007, sehingga populasi ternak mencapai 12,3 juta ekor (Jamalzen, 2009).

Sektor peternakan tidak dapat dipisahkan dari sektor induknya yaitu sektor pertanian. Hasil evaluasi kinerja sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor peternakan hingga tahun 2008 masih memberikan nilai selisih ekspor dan impor yang cukup tinggi, yaitu sekitar (-) 1,204 miliar USD sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja ekspor dan impor sektor pertanian tahun 2008
Table 1. Export and import performance on agricultural sector in 2008

No.	SubSektor (<i>Subsector</i>)	Ekspor (<i>Export</i>) (US\$ Miliar)	Impor (<i>Import</i>) (US\$ Miliar)	Selisih (<i>Balance</i>) (US\$ Miliar)
1.	Tanaman Pangan (<i>Food plants</i>)	0,349	3,527	-3,178
2.	Hortikultura (<i>Horticulture</i>)	0,434	0,926	-0,492
3.	Peternakan (<i>Livestock</i>)	1,148	2,352	-1,204
4.	Perkebunan (<i>Crop estate</i>)	27,370	4,536	22,834
	Jumlah (<i>Total</i>)	29,301	11,361	19,940

Sumber (*Source*): Hafsah, (2009); Diolah/*Calculated*.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja sektor peternakan masih rendah yang ditandai dengan defisit (negatif) antara total nilai ekspor dan impornya sehingga menempatkan subsektor peternakan berada di urutan ketiga (setelah perkebunan dan hortikultura) dalam kontribusinya terhadap keseluruhan kinerja sektor pertanian.

Berkaitan dengan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan masih cukup tinggi sebagai hasil kontribusi subsektor perkebunan, namun nilai total impor produk pertanian lainnya masih relatif tinggi, yaitu US\$ 5,287 miliar sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Proporsi subsektor peternakan dalam nilai total impor produk pertanian tahun 2008

Table 2. Proportion of livestock subsector in total import value of agriculture product in 2008

No.	Produk Pertanian Impor/ <i>Imported Agriculture Product</i>	Nilai/ <i>Value</i> (US\$ Miliar)	Persentase/ <i>Percentage (%)</i>
1.	Gandum/	2,371	44,84
2.	Kedelai/ <i>Soyabean</i>	0,732	13,85
3.	Gula/ <i>Sugar</i>	0,859	16,25
4.	Susu/ <i>Milk</i>	0,755	14,28
5.	Daging Sapi/ <i>Cow meet</i>	0,480	9,08
6.	Garam/ <i>Salt</i>	0,090	1,70
	Jumlah / <i>Total</i>	5,287	100

Sumber (*Source*): Hafsah, (2009); Diolah/*Calculated*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai impor produk pertanian ini setiap tahunnya sebesar Rp. 52,87 triliun. Nilai impor ini setara dengan 5% dari total APBN nasional dan dianggap terlalu besar dibandingkan dengan anggaran Departemen Pertanian yang hanya sekitar Rp. 8 triliun serta total anggaran pembangunan pertanian secara keseluruhan sebesar Rp. 40 triliun. Melihat masih besarnya impor produk pertanian, maka pengembangan program wanaternak yang berhasil akan mengurangi porsi nilai impor produk perternakan sekitar 23,3 % dari nilai total impor produk pertanian.

Pelaksanaan program wanaternak yang berkelanjutan oleh Dephut merupakan langkah yang tepat dan strategis dengan beberapa alasan: (i) kontribusi subsektor peternakan yang potensial dalam mengurangi nilai impor produk pertanian; (ii) pengembangan wanaternak akan mendukung pencapaian swasembada daging nasional tahun 2010; (iii) pengembangan wanaternak diharapkan mendukung 2 bidang (pembangunan peternakan dan pengolahan hasil perternakan) dari 10 kluster industri unggulan, yaitu sebagai tercantum dalam Visi 2030 dan Road Map Kadin; dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekitar (50-300%) dibandingkan dengan pendapatan petani tanpa ternak seperti yang terjadi di Sumbawa (Partners, 2009).

C. Kriteria dan Indikator Hutan untuk Program Wanaternak

Penetapan alokasi kawasan hutan seluas 200.000 ha untuk pengembangan wanaternak perlu dicermati secara seksama karena selama ini alokasi kawasan hutan untuk berbagai keperluan di luar sektor kehutanan cenderung menyimpang dari prosedur yang ada (Subarudi, 2008). Sebagai contoh alokasi lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sudah ditetapkan di areal hutan rawang dengan potensi sekitar 20 m³/ha, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata hutan tersebut masih memiliki potensi yang relatif tinggi (di atas 50 m³/ha). Di samping itu, banyak pengusaha mengajukan permohonan izin pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan hanya sebagai dalih untuk mendapatkan keuntungan besar dari Izin Pemnafaatan Kayu (IPK) pada areal hutan alam yang dikonversi (Narendra, 2008). Oleh karena itu penyusunan kriteria dan indikator kawasan hutan yang tepat untuk pengembangan wanaternak sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dephut.

Penulis mencoba menyusun kriteria dan indikator kawasan hutan yang tepat untuk wanaternak dan telah didiskusikan secara internal di Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan yang akan dialokasikan untuk pengembangan wanaternak harus memenuhi kriteria: (i) kawasan hutan yang tidak dibebani hak, (ii) merupakan hutan eks HPH dengan potensi dibawah 20 m³/ha, (iii) dekat dengan lokasi desa dan sumber konflik, dan (iv) perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan sektor peternakan di daerah tujuan alokasi.

Sebagai contoh Gubernur NTT akan membangun koordinasi khusus dengan semua Bupati dan Walikota di wilayahnya terkait dengan tekad mengembalikan kejayaan ternak. Upaya pengembalian kejayaan ternak NTT ini perlu dilakukan secara simultan dan jangka panjang (misalnya hingga tahun 2025) serta diformulasikan dalam tahapan yang jelas dan terukur terkait dengan persoalan pembibitan sapi, pakan ternak dan ketersediaan air (Kompas, 17/10/2009). Hal ini diwujudkan dengan menaikkan anggaran sektor

peternakan tiga kali lipat dari alokasi Rp. 3 miliar tahun 2008 menjadi Rp. 9 miliar pada tahun 2009 dan 2010 sebagai komitmen pemerintah NTT untuk mengembalikan NTT sebagai sentra produksi ternak sapi nasional (Kompas, 26 September 2009).

Tabel 3. Kriteria dan indikator kawasan hutan untuk wanaternak

Table 3. *Criteria and Indicator of forest area for silvopasture*

No.	Kriteria Kawasan Hutan untuk Wanaternak / <i>Criteria of forest area for silvopasture</i>	Indikator / <i>Indicator</i>	Keterangan / <i>Remark</i>
1.	Tidak dibebani hak apapun / <i>None license on it</i>	Tidak ada SK Penunjukan pemanfaatan dari Menhut atau Izin lainnya dari Bupati dan Gubernur	SKHPH, SKHPHTI, SKHKM, SKHTR
2.	Sudah terbuka dan berada di hutan Produksi eks HPH / <i>opened land and located at production forest ex-forest concession holder</i>	Potensi kayu sekitar 20 m ³ /ha sesuai kriteria potensi hutan rawang	Direkomendasikan oleh Tim Penilai Independen (LSM)
3.	Berada dekat dengan lokasi desa di dalam dan di sekitar hutan / <i>located at enclaved village and forest surrounding area</i>	Paling sedikit ada 2 desa terdekat dalam satu kecamatan	Hasil survey Dishut Kabupaten
4.	Berada di wilayah provinsi atau kabupaten yang memilih sektor peternakan sebagai prioritas pembangunan di daerahnya / <i>located at provincial and district which has livestock sector as development priority</i>	Sektor peternakan mendapat porsi APBD yang besar Tidak berlaku bagi investasi swasta/koporat	NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Papua
5.	Berada pada lokasi desa yang termasuk katagori daerah tertinggal atau miskin / <i>Located at village catagorized as poorer villlage</i>	Penduduknya masuk ke dalam golongan Ekonomi lemah dengan pendapatannya setara dengan UMR	Validasi dengan data Daerah Tertinggal dari Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal

Tabel 3. Lanjutan
 Table 3. Continued

No.	Kriteria Kawasan Hutan untuk Wanaternak/ <i>Criteria of forest area for silvopasture</i>	Indikator/Indicator	Keterangan/Remark
6.	Karakteristik hutan cocok untuk pengembangan pakan ternak/ <i>Forest characteristics is suitable for cattle feeding development</i>	Rumput gajah dan <i>King Grass</i> tumbuh subur	Validasi dengan hasil penelitian Balitbanghut
7.	Terdapat sumber mata air atau terdapat lokasi embung-embung air/ <i>water resource is available</i>	Ada sumber mata air dan embung air	Validasi dengan keterangan penduduk setempat
8.	Berada dekat dengan lokasi pemasaran/pasar ternak lokal dan nasional/ <i>Located at local and national cattle market</i>	Ada pasar-pasar hewan lokal dan pabrik pengolahan susu	Validasi dengan Dinas Indag setempat
9.	Infrastruktur untuk transportasi produk wanaternak tersedia/ <i>infrastructure for transporting silvopasture products is available</i>	Transportasi mudah dan murah tersedia	Validasi dengan Dinas PU setempat

D. Manajemen Wanaternak Berkelanjutan

Berkaitan dengan upaya pencapaian pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan, hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan faktor penentu keberhasilan pengelolaan wanaternak, yaitu penyediaan pakan ternak, pemeliharaan kesehatan ternak, dan pemasaran produk-produk wanaternak. Manajemen wanaternak yang sangat penting untuk diperhatikan di antaranya: (i) perencanaan, (ii) pengaturan, (iii) pelaksanaan, dan (iv) pengawasan terkait dengan pengelolaan wanaternak.

1. Perencanaan

Hal yang menjadi pokok bahasan dalam perencanaan pengelolaan wanaternak adalah menggunakan rumus 5 W + 1 H, yaitu: (i) sistem wanaternak seperti apa (*what*) yang

akan dikembangkan; (ii) mengapa (*why*) wanaternak tersebut dipilih untuk dikembangkan; (iii) dimana (*where*) wanaternak akan dikembangkan; (iv) siapa (*who*) yang akan mengembangkan wanaternak tersebut; (v) kepada siapa (*to whom*) produk wanaternak tersebut dijual; dan (vi) bagaimana (*how*) cara mengembangkan wanaternak tersebut.

Sistem wanaternak yang akan dikembangkan sebaiknya menggunakan sistem kandang daripada sistem penggembalaan (*ranch*) karena sistem penggembalaan yang tidak terkendali akan memadatkan tanah dan meningkatkan matinya tanaman permudaan. Di samping itu sistem kandang dapat memberikan dampak ekonomi ikutan terhadap pemanfaatan air seni dan kotoran dari ternak untuk pembuatan pupuk organik dan insektisida alami. Pramonosidi (2009) telah menerapkan model peternakan dan pertanian terpadu di Sukoharjo, Jawa Tengah sejak tahun 2005. Kegiatan dimulai mengolah kotoran sapi menjadi pupuk padat dan cair serta mengolah urine menjadi pestisida yang diberinama Ursa Plus.

Wanaternak dipilih untuk dikembangkan karena adanya kontribusi yang cukup tinggi dari subsektor peternakan terhadap tingginya tingkat impor produk pertanian. Di samping itu pengembangan wanaternak merupakan upaya Departemen Kehutanan untuk mewujudkan hutan untuk pengentasan kemiskinan (*forest for poverty reduction*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*forest for prosperity*) petani yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Wanaternak seharusnya dikembangkan di daerah-daerah yang memang peduli dan menjadikan subsektor peternakan sebagai sektor unggulan pembangunan di wilayahnya seperti di Sulawesi Selatan, NTT, NTB dan Papua. Oleh karena itu alokasi kawasan hutan seluas 200.000 ha hendaknya difokuskan terlebih dahulu ke daerah-daerah yang memang berkeinginan kuat untuk mengembangkan peternakan sebagai sektor ekonomi unggulan.

Pengembangan wanaternak sebaiknya dilakukan oleh koperasi desa yang mewadahi beberapa kelompok-kelompok tani untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Sebelum diberikan pada koperasi-koperasi desa hendaknya dilakukan evaluasi terhadap koperasi desa yang ada dengan skema sebagai berikut: (i) koperasi desa yang sudah maju maka pengelolaan wanaternak dapat diprioritaskan kepada koperasi ini, (ii) koperasi desa yang sedang berkembang perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan koperasi tersebut menuju pengelolaan koperasi yang maju, (iii) koperasi yang kurang berkembang diberikan penguatan kapasitas melalui diklat dan bimbingan teknis yang terus menerus, dan (iv) bagi desa yang ingin membentuk koperasi baru perlu difasilitasi sehingga pengelolaan koperasi yang baru dapat terus berkembang dan melebihi dari perkembangan koperasi yang telah ada. Sebagai contoh produk susu yang dikelola oleh Fonterra, perusahaan eksportir susu terbesar di dunia yang menguasai sepertiga perdagangan susu dunia, merupakan sebuah koperasi yang sahamnya milik sekitar 11.000 peternak di seluruh Selandia Baru. Industri susu ini menghasilkan 25% produk ekspor ke 140 negara di dunia dan menyumbang 7,5% GDP Selandia Baru (Setyorini, 2009).

Produk wanaternak sebaiknya dijual atau dipasarkan kepada industri pengolahan produk ternak (daging dan susu) yang memang berkepentingan dengan nasib petani ternaknya. Jika memungkinkan dapat saja koperasi-koperasi desa terdekat saling bekerjasama dan bahu membahu untuk membangun industri pengolahan daging dan

susu. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang sering dialami petani ternak dengan sistem tata niaga yang kurang adil dan lebih menguntungkan pemilik industri pengolahan produk ternak skala menengah dan skala besar.

Cara pengelolaan wanaternak dapat dilakukan dengan bantuan atau skema-skema pembiayaan yang ada. Saat ini Departemen Pertanian telah mengucurkan kredit usaha pembibitan sapi dan bank komersial telah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) serta pembiayaan dari CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan-perusahaan besar sehingga koperasi diberikan informasi yang benar tentang keuntungan dan kerugian dari berbagai skema pembiayaan wanaternak yang ada.

2. Pengaturan

Pengaturan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan wanaternak meliputi pembuatan aturan main (peraturan perundangan) dan perumusan kebijakan yang kondusif dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis wanaternak tersebut. Pengaturan umumnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan wanaternak yang terkait dengan alokasi lahan, teknologi pakan ternak yang murah dan sistem pemeliharaan ternak yang tepat.

Penyusunan peraturan dan kebijakan pelaksanaan wanaternak harus tetap dilakukan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani (*pro poor*), membuka peluang investasi (*pro investment*) dan mendukung pencapaian wanaternak yang berkelanjutan (*sustainable silvo-pature*).

Berkaitan dengan teknis pengelolaan ternak, ada beberapa proyek antara ACIAR (Australian Center for International Agriculture Research), Australia dengan Pemerintah Indonesia (Departemen Pertanian) yang relevan untuk dijadikan acuan, diantaranya: (i) proyek AS2/2004/004: *Improving smallholder crop-livestock systems in eastern Indonesia*, (ii) SMAR/2006/096: *Scaling up herd management strategies in crop-livestock system in Lombok, Indonesia*, dan (iii) SMAR/2006/061: *Building capacity in the knowledge and adoption of Bali cattle improvement technology in South Sulawesi* (Partners, 2009).

Sistem wanaternak sebaiknya diatur dengan memadukan antara wanatani dan peternakan sebagaimana dinyatakan oleh Pramonosidi (2009) bahwa model peternakan sapi dan pertanian terpadu akan dapat mencukupi kebutuhan daging sapi di dalam negeri dan bahkan bisa mengespor sapi ke luar negeri.

Di samping itu pengaturan lokasi hendaknya di lokasi-lokasi yang pernah sukses melaksanakan peternakan sapi terpadu seperti di daerah Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT karena pernah menjadi sentra produksi ternak sapi tahun 1982-1987 dengan memproduksi bobot sapi hidup di atas 300 kilogram per ekor (Ama, 2009).

3. Pelaksanaan

Selain memperhatikan tiga faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dalam pengelolaan wanaternak (penyediaan pakan ternak, menjaga kesehatan ternak, dan pemasaran produk ternak dan turunannya), ada beberapa hal yang juga perlu direspon secara baik dan benar untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan wanaternak, di antaranya:

1. Wanaternak dilakukan dengan sistem kandang yang telah terbukti lebih ramah lingkungan dan mempunyai dampak ekonomi ikutan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem penggembalaan.
2. Kawasan hutan yang dialokasikan untuk wanaternak harus dikelola dengan sistem wanatani dengan komposisi 50-60% tanaman kehutanan dan 40-50% tanaman pakan ternak atau tanaman pangan (*food security*). Sebagai contoh kombinasi produksi tanaman jagung jangan hanya diproyeksikan sebagai biji jagung untuk pakan ternak ataupun sektor pangan, akan tetapi diarahkan dalam bentuk produk olahan seperti '*baby corn*' (umurnya hanya 45 hari), setelah itu batang dan daunnya dapat dijadikan makanan ternak yang sangat bergizi bagi sapi (Porsiana, 2009).
3. Pengelolaan wanaternak dilakukan melalui koperasi desa dengan anggotanya berasal dari berbagai kelompok-kelompok tani yang ada dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi pengelola wanaternak.
4. Iptek dalam pengelolaan wanaternak sudah tersedia sebagai hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan ACIAR di Sulawesi (peningkatan kapasitas peternak terhadap pengetahuan dan adopsi dari teknologi peternakan sapi Bali), Sumbawa (upaya-upaya peningkatan produktivitas sistem ternak dan tanaman dalam skala kecil), dan Lombok (penemuan pita ukur keliling tubuh ternak untuk menduga berat ternak sehingga peternak memiliki daya tawar yang tinggi dalam penjualan ternaknya), sehingga tinggal mempercepat dan memperluas sistem adopsinya saja.
5. Di samping itu telah tersedia petunjuk teknis inovasi pakan ternak untuk usaha pembibitan sapi potong (Maryono dan Romjali, 2007), mengingat aspek pakan ternak sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan sapi.
6. Tata niaga dan pemasaran produk wanaternak harus dilakukan secara baik dan benar dengan melibatkan berbagai pihak dengan fokus yang menguntungkan petani (*pro poor*) secara adil dan berkelanjutan (*pro sustainability*). Porsiana (2009) menyarankan agar dinas terkait di bidang pertanian, peternakan dan industri dapat bersinergi. Sapi-sapi dari NTT tidak hanya dijual antar pulau dalam bentuk sapi hidup, tetapi juga berupa susu dan daging olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi.
7. Hutan dan ternak dapat menjadi kombinasi yang tepat dengan menanam pohon-pohon kehutanan yang sekaligus menjadi pakan ternak sehingga pohon-pohon tersebut dapat dimanfaatkan atau dipanen daun-daunnya tanpa harus menebang pohonnya secara langsung. Hal ini akan menambah nilai tambah ekonomi hasil hutan dan sekaligus mendukung sistem pengelolaan hutan lestari (SPHL). Di NTB, kombinasi pengelolaan tanaman dan ternak telah berhasil meningkatkan pendapatan petani sekitar 50-300% dibandingkan dengan pendapatan petani pengelolaan tanaman tanpa ternak.

4. Pengawasan

Khusus bidang pengawasan yang terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara berjenjang, di mana perkembangan sektor peternakan di kecamatan-kecamatan akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten setempat. Sementara perkembangan sektor peternakan di wilayah kabupaten akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh SKPD provinsi terkait.

Jika memang diperlukan dapat saja pemerintah provinsi memberikan pelimpahan tugas dan fungsi pengawasannya kepada lembaga LSM yang kredibel dan profesional di bidangnya atau perguruan tinggi setempat. Hal ini dilakukan pemda setempat dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam program peternakan yang diluncurkannya.

E. Strategi Implementasi Program Wanaternak

Strategi implementasi program wanaternak yang harus diperhatikan oleh Departemen Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Dephut harus punya komitmen tinggi dan konsisten dengan kebijakan pengembangan wanaternak sebagai bagian dari penerapan program besar hutan untuk pengentasan kemiskinan (*forest for poor*).
2. Penetapan alokasi kawasan hutan (seluas 200.000 hektar) harus sesuai dengan kriteria dan indikator yang sudah disusun sehingga hal ini akan menghindari penyimpangan pelaksanaannya di lapangan.
3. Alokasi kawasan hutan tersebut hendaknya diprioritaskan di daerah-daerah yang berkeinginan kuat untuk mengembangkan sektor peternakan di wilayahnya seperti NTT, NTB, Papua dan Sulawesi Selatan.
4. Dephut harus bekerja sama dengan Dirjen Peternakan dalam pembangunan dan pengembangan wanaternak tersebut sehingga akan terlihat sinergitas antara kedua institusi tersebut dan hasil pencapaian targetnya dapat lebih cepat dan dapat terlihat lebih jelas.
5. Seiring dengan berjalannya proses pengalokasikan kawasan hutan untuk wanaternak, maka Dephut dapat membuat plot demonstrasi wanaternak yang melibatkan Badan Litbang Kehutanan dan Badan Litbang Pertanian terutama Balai Penelitian Ternak Bogor.
6. Balitbang kehutanan di proses awal dapat melakukan inventarisasi tanaman-tanaman kehutanan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak seperti kemlandingan dan gamal. Hal yang sama dilakukan oleh Dirjen Peternakan yang tengah melaksanakan inventarisasi bibit sapi betina di seluruh nusantara.
7. Dephut dan Dirjen peternakan harus dapat mengatur tata niaga produk susu dan daging yang saling menguntungkan antara petani wanaternak dengan pengusaha industri persusuan dan produk daging.
8. Pemda harus menyediakan infrastruktur jalan untuk memudahkan transportasi penjualan produk-produk wanaternak agar lebih cepat sampai ke tujuan pemasarannya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengembangan program wanaternak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan diwujudkan dalam koridor pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan peranan hutan dalam pengentasan kemiskinan.

Pengembangan wanaternak selama ini diperkenalkan oleh Departemen Kehutanan berupa konsep yang telah banyak dilakukan dengan skala kecil dan menengah dengan inisiasi masyarakat sendiri dan tanpa bantuan program pemerintah.

Pengembangan wanaternak dapat mendukung program pengentasan kemiskinan karena fakta yang ada menunjukkan bahwa kontribusi ternak, misalnya di NTB telah mampu meningkatkan pendapatan petani sekitar 50-300% dari pendapatan mereka tanpa ternak.

Pengalokasikan kawasan hutan untuk pengembangan wanaternak seharusnya dilakukan setelah selesai penyusunan kriteria dan indikatornya untuk menghindari penyimpangan alokasi kawasan hutan untuk penggunaan lainnya di luar pengembangan wanaternak.

Manajemen wanaternak yang berkelanjutan harus terus diupayakan dengan merancang sistem wanaternak yang unggul dan terpadu, kelembagaan pengelola wanaternak yang jelas dan rinci, proses pengolahan dan diversifikasi produk wanaternak yang sehat dan bernilai tinggi, dan proses pemasaran yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran tersebut sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

Strategi mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (Cq. Dirjen Peternakan) dan pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya.

B. Saran

Badan Litbang kehutanan harus mendukung Departemen Kehutanan untuk mewujudkan pengembangan wanaternak yang berkelanjutan dengan memberikan sumber alternatif pakan ternak dari pohon-pohon kehutanan dan efisiensi sistem wanatani terpadu dengan peternakan.

Badan Litbang Kehutanan dan Balai Penelitian Ternak perlu bersinergi untuk memberikan iptek dan informasi pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan kepada para petani ternak dalam rangka merealisasikan program hutan untuk pengentasan kemiskinan.

Pemda yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya harus mampu memotivasi dan menggerakkan semua SKPDnya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pengembangan wanaternak di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

AgroIndonesia. 2009. Kredit Baru Swasembada Daging. Koran Mingguan AgroIndonesia, Vol. VI, No. 266, 8-14 September 2009.

Danim, S. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Cetakan Kedua. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Hadi, P.U., dan Ilham, N. 2002. Problem dan Prospek Pengembangan Pembibitan Sapi Potong di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian* 21 (4): 148-157. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Kompas. 2009. Dana Ternak Dinaikkan: Kembalikan NTT Sebagai Sentra Ternak Sapi Nasional. *Harian Kompas*, tanggal 26 September 2009. Jakarta.
- Kompas. 2009. Pemberdayaan: Hutan Produksi Diizinkan Jadi Peternakan. *Harian Kompas*, tanggal 1 September 2009. Jakarta.
- Hafsah, M.J. 2009. Membangun Pertanian Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. *Harian Kompas*, tanggal 24 September 2009. Jakarta.
- Jamalzen. 2009. Target Peningkatan Populasi Sapi 2,4%. *Koran Mingguan AgroIndonesia*, Vol. VI, No. 274, 10-16 Nopember 2009.
- Kompas. 2009. Peternakan: Gubernur NTT Bangun Koordinasi dengan Bupati. *Harian Kompas*, tanggal 17 Oktober 2009. Jakarta.
- Ama, K.K. 2009. Peternakan: Lanjutkan Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Besipae. *Harian Kompas*, tanggal 29 September 2009. Jakarta.
- Setyorini, I. 2009. Susu: Pilar Ekonomi Selandia Baru. *Harian Kompas*, tanggal 9 Oktober 2009. Jakarta.
- Maryono dan Romjali, E. 2007. Petunjuk Teknis Inovasi "Pakan Murah" Untuk Usaha Pembibitan Sapi Potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Narendra, B.H. 2008. Alih Fungsi (Konversi) Kawasan Hutan Indonesia: Tinjauan Aspek Hidrologi dan Konservasi Tanah. *Prosiding Seminar "Perubahan Fungsi Kawasan Hutan: Kajian Konseptual, Legal dan Implementasinya dalam Pembangunan Lintas Sektor"* di Bogor, 14 Agustus 2008. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Partners. 2009. Enabling More Secure Livelihoods in Uncertain Times. *Majalah Partners: In research for Development*, March-June 2009. ACIAR, Australian Government.
- Porsiana, A. 2009. Kewirausahaan: Bersinar di Agroindustri Peternakan. *Harian Kompas*, tanggal 16 Oktober 2009. Jakarta.
- Pramonosidi, D. 2009. Tempat Berguru Petani dan Peternak Sapi. *Harian Kompas*, tanggal 13 November 2009. Jakarta.
- Subarudi. 2000. PMDH: Konsepsi dan Aktualisasi. *Info Sosial Ekonomi* 1 (1): 25-36. Pusat Penelitian Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- , 2008. Kebijakan dan Dampak Pemekaran Wilayah/ Alih Fungsi Lahan Terhadap Laju Kehilangan Hutan. *Prosiding Seminar "Perubahan Fungsi Kawasan Hutan: Kajian Konseptual, Legal dan Implementasinya dalam Pembangunan Lintas Sektor"* di Bogor, 14 Agustus 2008. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.

Sugiarto. 2009. Dephut Tawarkan HPH Sapi. Koran Mingguan AgroIndonesia, Vol. VI, No. 274, 10-16 Nopember 2009.

Winarto, B. 2006. Kamus Rimbawan. Yayasan Bumi Indonesia Hijau. Jakarta.